

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Granger

Menurut Todaro (2006) dalam teori siklus populasi-kemiskinan (*population-poverty cycle*), terdapat hubungan antara jumlah penduduk dengan kemiskinan, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian untuk melihat apakah POPULASI sebagai penyebab POVERTY atau sebaliknya.

Tabel 4.1 Hasil Uji Granger

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/20/10 Time: 13:00
Sample: 2005 2008
Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
POPULASI does not Granger Cause POVERTY	2	4.57141	0.01291
POVERTY does not Granger Cause POPULASI		2.05100	0.13748

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai probabilitas tersebut diatas, tampak bahwa kausalitas granger berjalan satu arah dari POPULASI ke POVERTY tetapi tidak sebaliknya, sehingga variabel POPULASI dapat digunakan dalam model jumlah penduduk miskin yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2 Hasil Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis panel data (*pooling data*), keunggulan menggunakan panel data sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan hasil akhir panel data apakah menggunakan *Common*, *Fixed Effect* atau menggunakan *Random Effect*, digunakan Uji F atau Uji *Chow* dan Uji *Hausmann*.

4.2.1 Metode Regresi yang digunakan dalam model awal

Setelah melakukan *running* pada software Eviews dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* maka selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi untuk memilih metode mana yang lebih cocok untuk model penelitian ini. Pengujian signifikansi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

A. Uji *Chow*

Untuk mengetahui ada tidaknya efek individual dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dalam jumlah penduduk miskin, maka dilakukan uji *Chow* atau uji F_{stat} setelah dilakukan penghitungan dengan pilihan *common* dan *individual effect*.

Tabel 4.2 Hasil Uji *Chow* atau F_{stat} (*Pooled vs Individual*)

F_{tabel}	$F_{statistik}$	Kesimpulan
1,50	31,97996	Karena $F_{stat} > F_{tabel}$, maka tolak H_0 , artinya pada model terdapat efek individu, sehingga perlu dilakukan uji <i>Hausmann</i>

Sumber: Data diolah

Hasil Uji F_{stat} atau Uji *Chow* menolak H_0 , karena $F_{stat} > F_{tabel}$, sehingga terdapat efek individual dalam model jumlah penduduk miskin/*poverty* dengan beberapa variabel bebasnya, dengan demikian model yang dibuat mempunyai intersep yang berbeda antar Kabupaten/Kota sedangkan *slopenya* sama, sehingga perlu dilakukan pengujian lagi untuk melihat apakah efek individu bersifat tetap atau acak, yaitu dengan melakukan uji *Hausmann*.

B. Uji *Hausmann*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan (*fixed effect* atau *random effect*) dalam mengestimasi jumlah penduduk miskin. Uji ini memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-square statistics* sehingga keputusan pemilihan metode dapat ditentukan secara benar. Hasil uji *Hausmann* disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji *Hausmann*

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{tabel (0,05,4)}$	H ₀ diterima/ditolak	Kesimpulan
9,222936	9,48773	$\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka terima H ₀	Metode yang tepat menggunakan <i>Random Effect</i>

Sumber: Data diolah

Hasil uji *Hausmann* menerima H₀, karena $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, maka metode yang tepat digunakan dalam mengestimasi jumlah penduduk miskin adalah *random effect*. Dalam *random effect* diasumsikan komponen *error individual* tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak ada autokorelasi baik *cross section* maupun *time series* (Pindyck dan Rubenfield, 1998).

Kedua variabel *random* tersebut yaitu variabel *cross section* dan *time series* diasumsikan berdistribusi normal dengan derajat bebas yang berkurang, sehingga model *random effect* dapat diestimasi sebagai regresi GLS (*Generalized Least Squared*) yang akan menghasilkan penduga yang memenuhi sifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE), dengan demikian adanya gangguan asumsi klasik dalam model ini telah terdistribusi secara normal, sehingga tidak diperlukan lagi *treatment* terhadap model bagi pelanggaran asumsi klasik, yaitu asumsi adanya autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastik, oleh karena itu model persamaannya menjadi :

$$\text{POVERTY} = 353,6806 - 0,003273 * \text{PDRB} + 0,000162 * \text{POPULASI} \\ - 3,074453 * \text{AMH} - 0,436157 * \text{AHH}$$

C. Evaluasi Model

- Uji Parsial (Uji t)

Uji ini untuk menguji signifikansi peranan setiap variabel secara *individual* atau parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Mencari t_{tabel} dengan interval $\alpha=5\%$ pengujian satu sisi, maka akan diperoleh t_{tabel} sebagai berikut:

$$T_{tabel} (t\text{-kritis}) = \{ \alpha; df=(n-k) \} \dots \dots \dots (4.1) \\ = \{ 5\%; df=(38-4) \} \\ = \{ 0,05; df=34 \}$$

$$T_{tabel} (t\text{-kritis}) = 1,697$$

Dengan membandingkan hasil estimasi pada tabel sebesar 1,697 dengan nilai $t_{\text{statistik}}$, maka:

- a. Uji t terhadap variabel PDRB (Miliar Rupiah)
 Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 34, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar -3,833259, dengan demikian secara individu variabel PDRB *berpengaruh* dan *signifikan* menurunkan jumlah penduduk miskin
 - b. Uji t terhadap variabel POPULASI (Jiwa)
 Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 34, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 10,22596, dengan demikian secara individu variabel POPULASI *berpengaruh* dan *signifikan* menambah jumlah penduduk miskin
 - c. Uji t terhadap variabel AHH (Tahun)
 Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 34, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar -1,234377, dengan demikian secara individu variabel AHH *berpengaruh* dan *tidak signifikan* terhadap jumlah penduduk miskin.
 Hal ini diduga karena *series* yang digunakan relatif pendek, mulai tahun 2005-2008, sedangkan untuk ilmu sosial-ekonomi, biasanya memberikan dampak pada jangka panjang.
 - d. Uji t terhadap variabel AMH (Persen)
 Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 34, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar -4,498404, dengan demikian secara individu variabel AMH *berpengaruh* dan *signifikan* menurunkan jumlah penduduk miskin
- Kemampuan Model
 - a. Uji Serempak (Uji F), uji ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$$F = \frac{r^2/k-1}{1-r^2/n-k} \dots\dots\dots(4.2)$$

$$F = \frac{0,972568/4-1}{1-0,972568/38-4} = \frac{0,972568/3}{0,027432/34} = 401,8095$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha, n-1, nt-n-k) = (0,05, 37, 152-38-5) = (0,05, 37, 109) = 1,50$$

Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka tolak H_0 , artinya variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat dengan kata lain variabel PDRB, POPULASI, AMH, AHH secara bersama-sama mempengaruhi variabel POVERTY/

b. Uji Kesesuaian (R^2)

Hasil estimasi model dengan metode *random effect* menunjukkan R^2 yang sangat tinggi yaitu 0.972568, nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin sebesar 97,2568% sedangkan sisanya sebesar 2,7432% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ikut disertakan dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa model estimasi *representative* dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil estimasi di atas juga terlihat bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas yang dimodelkan, jumlah penduduk miskin tetap akan terjadi pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur dan masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai pengaruh yang bervariasi.

- Uji Pelanggaran Asumsi

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai gangguan sebelumnya. Uji *autokorelasi* yang paling sederhana adalah menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW*). Sebagai *rule of thumb* nilai *DW* hitung yang mendekati 2 dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari *autokorelasi* (Gujarati, 2003:469).

Dari hasil regresi diperoleh nilai $D-W_{\text{statistik}}$ sebesar 1,602253. Dengan $n = 38$, $k = 4$, level (α) 5%, maka nilai $dl = 1,261$ $du = 1,722$ sehingga $(4-dl) = 4-1,261 = 2,739$ dan $(4-du) = 4-1,722 = 2,278$. Ternyata nilai

D-W_{statistik} sebesar 1,602253 berada di daerah ragu-ragu, ini berarti model yang diestimasi tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil korelasi matriks antara variabel PDRB, POPULASI, AMH dan AHH sebagaimana tersebut dalam lampiran 8, menunjukkan terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,8 yaitu antara variabel AHH dan AMH sebesar 0,931339, untuk itu perlu dilakukan *treatment* dengan cara menghilangkan variabel AHH, yang mempunyai korelasi yang paling besar dari model awal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Karena metode estimasi menggunakan metode GLS (*Generalized Least Squares*), maka masalah heteroskedastisitas sudah tidak terjadi lagi.

4.2.2 Metode Regresi yang digunakan setelah model dirubah

Setelah melakukan *running* pada software Eviews dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* maka selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi untuk memilih metode mana yang lebih cocok untuk model penelitian ini. Pengujian signifikansi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

A. Uji *Chow*

Untuk mengetahui ada tidaknya efek individual dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dalam jumlah penduduk miskin, maka dilakukan uji *Chow* atau uji F_{stat} setelah dilakukan penghitungan dengan pilihan *common* dan *individual effect*.

Tabel 4.4 Hasil Uji *Chow* atau F_{stat} (*Pooled vs Individual*)

F_{tabel}	$F_{statistik}$	Kesimpulan
1,50	31,97996	Karena $F_{stat} > F_{tabel}$, maka tolak H_0 , artinya pada model terdapat efek individu, sehingga perlu dilakukan uji <i>Hausmann</i>

Sumber: Data diolah

Hasil Uji F_{stat} atau Uji *Chow* menolak H_0 , karena $F_{stat} > F_{tabel}$, sehingga terdapat efek individual dalam model jumlah penduduk miskin/*poverty* dengan beberapa variabel bebasnya, dengan demikian model yang dibuat mempunyai intersep yang berbeda antar Kabupaten/Kota sedangkan *slopenya* sama, sehingga perlu dilakukan pengujian lagi untuk melihat apakah efek individu bersifat tetap atau acak, yaitu dengan melakukan uji *Hausmann*.

B. Uji *Hausmann*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan (*fixed effect* atau *random effect*) dalam mengestimasi jumlah penduduk miskin. Uji ini memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-square statistics* sehingga keputusan pemilihan metode dapat ditentukan secara benar. Hasil uji *Hausmann* disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji *Hausmann*

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{tabel(0,05,4)}$	H_0 diterima/ditolak	Kesimpulan
9,032442	9,32743	$\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka terima H_0	Metode yang tepat menggunakan <i>Random Effect</i>

Sumber: Data diolah

Hasil uji *Hausmann* menerima H_0 , karena $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, maka metode yang tepat digunakan dalam mengestimasi jumlah penduduk miskin adalah *random effect*. Dalam *random effect* diasumsikan komponen *error individual* tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak ada autokorelasi baik *cross section* maupun *time series* (Pindyck dan Rubenfield, 1998).

Kedua variabel *random* tersebut yaitu variabel *cross section* dan *time series* diasumsikan berdistribusi normal dengan derajat bebas yang berkurang, sehingga model *random effect* dapat diestimasi sebagai regresi GLS (*Generalized Least Squared*) yang akan menghasilkan penduga yang memenuhi sifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE), dengan demikian adanya gangguan asumsi klasik dalam model ini telah terdistribusi secara normal, sehingga tidak diperlukan lagi *treatment* terhadap model bagi pelanggaran asumsi klasik, yaitu asumsi adanya autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastik.

Setelah melewati 2 (dua) tahap pengujian signifikansi model maka dilakukan uji hipotesa dan signifikansi untuk model yang terpilih. Dalam penelitian ini dipilih model *random effect* dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{POVERTY} = 329,9756 - 0,003322 * \text{PDRB} + 0,000163 * \text{POPULASI} - 3,141469 * \text{AMH}$$

adapun hasil estimasi model yang diolah dengan software *Eviews* sebagaimana tersebut pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Model Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2008

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	329.9756	63.42693	5.202452	0.0000
PDRB?	-0.003322	0.000859	-3.869295	0.0002
POPULASI?	0.000163	1.59E-05	10.20868	0.0000
AMH?	-3.141469	0.682255	-4.604537	0.0000
R-squared	0.972409			

Sumber: Data diolah

- **Evaluasi Model**

- Uji Parsial (Uji t)

Uji ini untuk menguji signifikansi peranan setiap variabel secara *individual* atau parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Mencari t_{tabel} dengan interval $\alpha=5\%$ pengujian satu sisi, maka akan diperoleh t_{tabel} sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T_{\text{tabel}} (\text{t-kritis}) &= \{ \alpha; \text{df}=(n-k) \} \dots\dots\dots(4.1) \\ &= \{ 5\%; \text{df}=(38-3) \} \\ &= \{ 0,05; \text{df}=35 \} \end{aligned}$$

$$T_{\text{tabel}} (\text{t-kritis}) = 1,697$$

Dengan membandingkan hasil estimasi pada tabel sebesar 1,697 dengan nilai $t_{\text{statistik}}$, maka:

- a. Uji t terhadap variabel PDRB (Miliar Rupiah)

Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 35, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar -3,869295, dengan demikian secara individu

variabel PDRB *berpengaruh* dan *signifikan* menurunkan jumlah penduduk miskin

b. Uji t terhadap variabel POPULASI (Jiwa)

Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 35, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 10,20868, dengan demikian secara individu variabel POPULASI *berpengaruh* dan *signifikan* menambah jumlah penduduk miskin

c. Uji t terhadap variabel AMH (Persen)

Dengan menggunakan tingkat interval keyakinan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan 35, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,697, sedangkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar -4,604537, dengan demikian secara individu variabel AMH *berpengaruh* dan *signifikan* menurunkan jumlah penduduk miskin

➤ Kemampuan Model

a. Uji Serempak (Uji F), uji ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$$F = \frac{r^2/k-1}{1-r^2/n-k} \dots\dots\dots(4.2)$$

$$F = \frac{0,972409/3-1}{1-0,972409/38-3} = \frac{0,972409/2}{0,027432/35} = 620,3397$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha, n-1, nt-n-k) = (0,05, 37, 152-38-4) = (0,05, 37, 110) = 1,59$$

Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka tolak H_0 , artinya variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat dengan kata lain variabel PDRB, POPULASI, AMH secara bersama-sama mempengaruhi variabel POVERTY

b. Uji Kesesuaian (R^2)

Hasil estimasi model dengan metode *random effect* menunjukkan R^2 yang sangat tinggi yaitu 0.972409 nilai ini menunjukkan

bahwa model memiliki kemampuan menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin sebesar 97,2409% sedangkan sisanya sebesar 2,7591% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ikut disertakan dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa model estimasi *representative* dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil estimasi di atas juga terlihat bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas yang dimodelkan, jumlah penduduk miskin tetap akan terjadi pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur dan masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai pengaruh yang bervariasi.

➤ Uji Pelanggaran Asumsi

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai gangguan sebelumnya. Uji *autokorelasi* yang paling sederhana adalah menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW*). Sebagai *rule of thumb* nilai *DW* hitung yang mendekati 2 dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari *autokorelasi* (Gujarati, 2003:469).

Dari hasil regresi diperoleh nilai $D-W_{\text{statistik}}$ sebesar 1,596689. Dengan $n = 38$, $k = 3$, level (α) 5%, maka nilai $dl = 1,318$ dan $du = 1,656$ sehingga $(4-dl) = 4-1,318 = 2,682$ dan $(4-du) = 4-1,656 = 2,344$. Ternyata nilai $D-W_{\text{statistik}}$ sebesar 1,596689 berada di daerah ragu-ragu, ini berarti model yang diestimasi tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil korelasi matriks antara variabel PDRB, POPULASI, AMH sebagaimana tersebut dalam lampiran 8, menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,8, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Karena metode estimasi menggunakan metode GLS (*Generalized Least Squares*), maka masalah heteroskedastisitas sudah tidak terjadi lagi.

4.3 Pembahasan

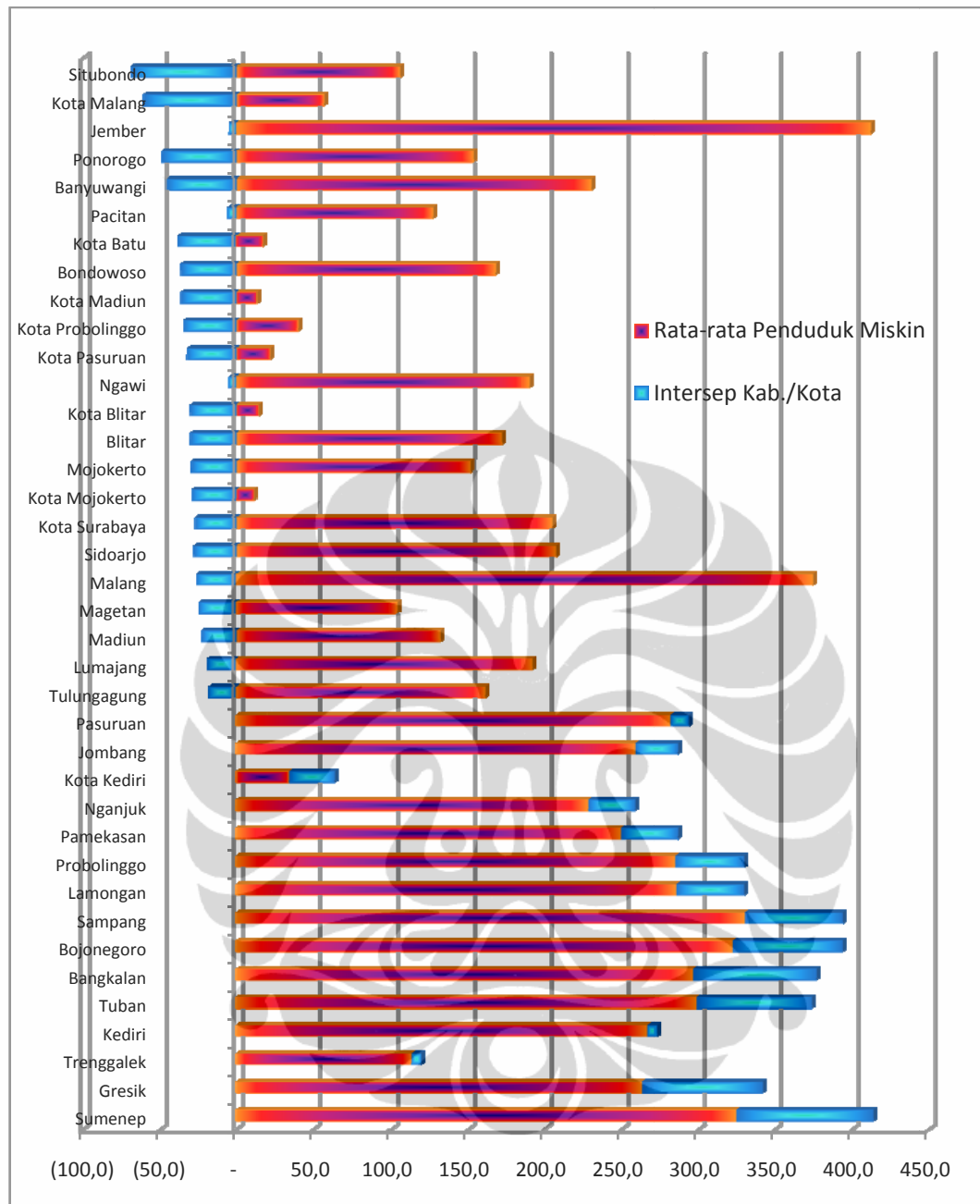
4.3.1 Interpretasi hasil regresi

Berdasarkan hasil evaluasi model sebagaimana tersebut diatas, tabel 4.6 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. PDRB memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga diduga setiap kenaikan PDRB sebesar Rp. 1 triliun mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 3.000 orang
2. Populasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sehingga diduga penambahan populasi sebesar 10.000 orang mampu meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1.000 orang
3. Angka melek huruf memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Sehingga diduga peningkatan angka melek huruf sebesar 1 unit (persen per tahun) mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 3.000 orang

4.3.2 Karakteristik Kemiskinan Kabupaten/Kota

Merujuk pada lampiran 4. Estimasi model dengan metode *Random Effect*, tampak bahwa intersep dari Kabupaten/Kota berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik data masyarakat miskin di masing-masing daerah, tanda minus (-) menunjukkan bahwa karakteristik daerah itu cenderung mengurangi jumlah penduduk miskin sedangkan tanda positif (+) menunjukkan karakteristik daerah itu cenderung menambah jumlah penduduk miskin (gambar 4.1).



Gambar 4.1 Rata-rata Penduduk Miskin dan Karakteristik Kab./Kota

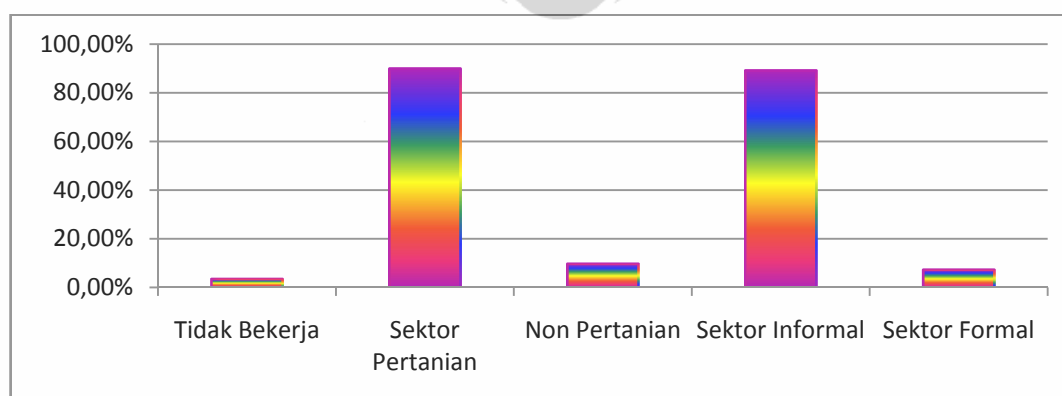
Sumber: Data Diolah

Hal menarik untuk dilihat adalah Kabupaten Sampang, karena Kabupaten ini memiliki persentase jumlah rata-rata penduduk miskin tahun 2005-2008 sebesar 37,69 persen, terbesar dari Kabupaten/Kota lain di Propinsi Jawa Timur dan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dari gambar tersebut, Kabupaten Sampang mempunyai intersep individu/karakteristik data kemiskinan sebesar 63.89673, artinya kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel PDRB, POPULASI dan AMH tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

disertakan dalam model atau dengan kata lain ketika variabel PDRB, POPULASI dan AMH = 0, maka kemiskinan tetap akan bertambah sebesar 63.8973. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Depdagri (2007), masyarakat miskin di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung musim dan rentan terhadap polusi dan kerusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan.

Di samping itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan utang pedagang atau pemilik kapal. Tekanan ekonomi yang terlalu kuat seringkali memaksa anak untuk bekerja di jalan yang umumnya tidak mendukung fisik dan kesehatan anak.

Gambar 4.2 menunjukkan rata-rata penduduk miskin Kabupaten Sampang bekerja di sektor pertanian/nelayan 89,97 persen sedangkan yang bekerja di sektor informal sebanyak 89,21 persen.

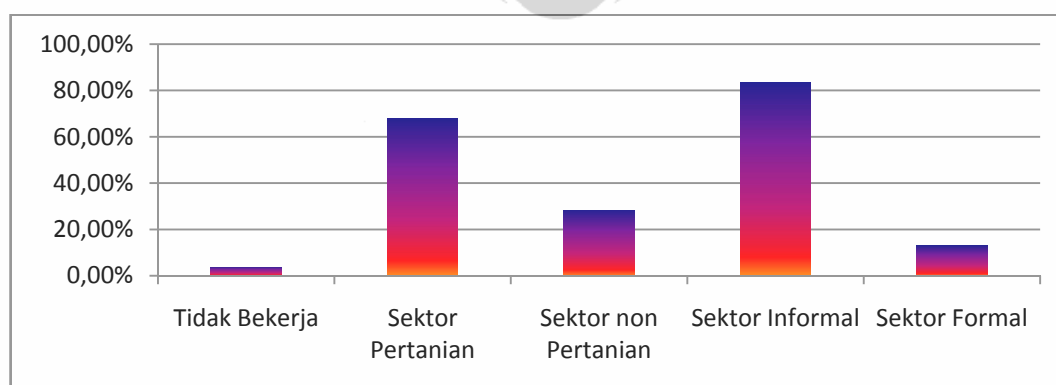


Gambar 4.2 Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin menurut sektor dan status bekerja, Kabupaten Sampang Tahun 2005-2008

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan, Diolah

Selain Kabupaten Sampang, Kabupaten lain yang menarik untuk dilihat adalah Kabupaten Bondowoso, karena Kabupaten ini memiliki persentase jumlah rata-rata penduduk miskin tahun 2005-2008 sebesar 23,84 persen dan mayoritas bekerja sebagai petani sebanyak 68,04 persen, hal ini sejalan dengan data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan diperkirakan 69%, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha diperkirakan sekitar 56,5% (Sensus Pertanian, 2003). Sebagaimana hasil penelitian Depdagri (2007), masyarakat miskin pedesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumahtangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Nilai intersep Kabupaten Bondowoso sebesar -36.19161, artinya kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel PDRB, POPULASI dan AMH tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model atau dengan kata lain ketika variabel PDRB, POPULASI dan AMH = 0, maka kemiskinan tetap akan berkurang sebesar 36.19161. Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata penduduk miskin Kabupaten Bondowoso bekerja di sektor pertanian 68,04 persen dan non pertanian 28,28 persen, sedangkan yang bekerja di sektor informal sebanyak 83,28 persen dan sektor formal sebanyak 13,03 persen.



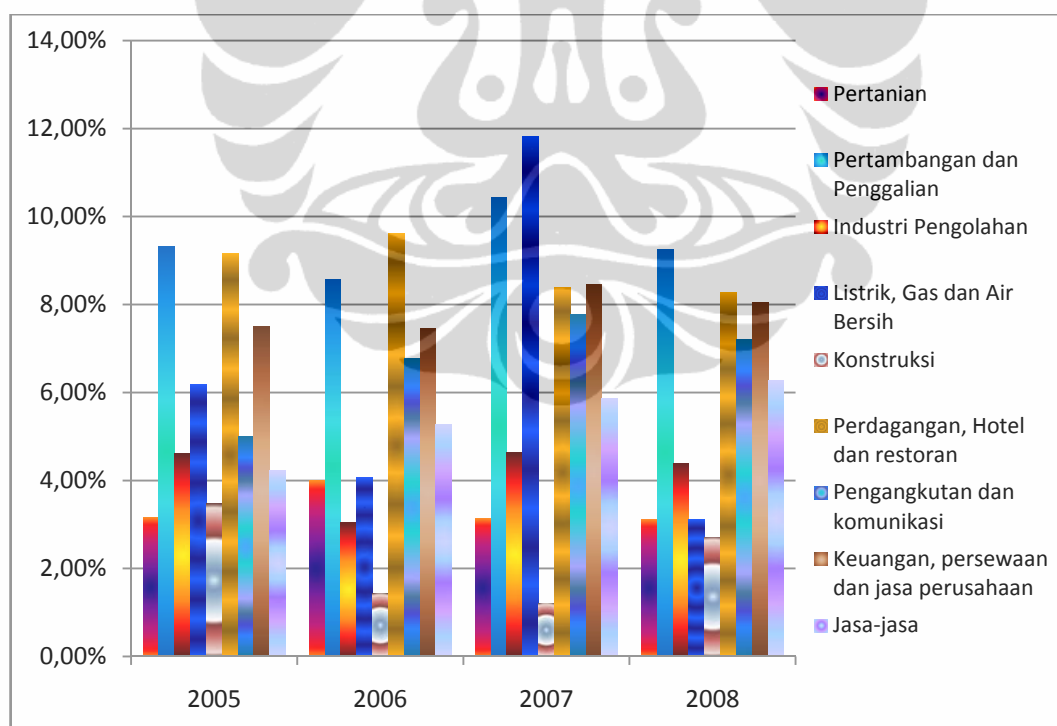
Gambar 4.3 Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin menurut sektor dan status bekerja, Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2008

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan, Diolah

Dari kedua Kabupaten tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karakteristik daerah (pesisir dan agraris/pegunungan) tidak mempengaruhi kemiskinan, tetapi pekerjaan penduduk sebagai buruh tani/nelayan dan nelayan kecil/petani gurem berpengaruh terhadap kemiskinan.

4.3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi, pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan pengaruh terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2008, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah relatif rendahnya *growth* di sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi 54,12 persen penduduk miskin yaitu rata-rata 3,35 persen per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain. Gambar 4.3 tampak bahwa perkembangan pertumbuhan sektor pertanian relatif kecil dibandingkan dengan sektor lain kecuali sektor konstruksi.



Gambar 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2005-2008

Sumber: BPS, PDRB Jawa Timur 2005-2008, diolah

Menurut SMERU (2007), agar masyarakat miskin ikut menikmati pertumbuhan ekonomi maka kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dititik-beratkan pada sektor ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan sebagian besar orang miskin, seperti pertanian, perikanan, dan sektor informal. Pemberdayaan perekonomian rakyat, pencabutan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah (daerah) yang mempersempit akses ekonomi masyarakat miskin, penghentian pungutan-pungutan terhadap petani, nelayan, peternak dan sebagainya adalah beberapa contoh kebijakan yang berdampak positif terhadap masyarakat miskin.

Menurut Todaro (2006), ada tiga dalil pokok yang merupakan syarat-syarat terpenting yang harus segera dilaksanakan dalam rangka merealisasikan setiap strategi pengembangan sektor-sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah pedesaan yang berorientasikan pada kepentingan rakyat banyak, yaitu: (1) struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan utama peningkatan produksi bahan pangan, (2) semua manfaat dari pembangunan pertanian berskala kecil tidak akan dapat direalisasikan secara nyata tanpa didukung oleh serangkaian kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk memberikan rangsangan atau insentif, kesempatan atau peluang-peluang ekonomi dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk mendapatkan segenap input utama guna memungkinkan para petani kecil meningkatkan tingkat output dan produktivitas mereka, (3) keberhasilan pembangunan pedesaan, selain bergantung pada kemauan-kemajuan petani kecil, juga ditentukan oleh upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, pembenahan pendidikan, kesehatan dan gizi penduduk, serta penyediaan berbagai bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan lainnya.

4.3.4 Populasi dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi, populasi terbukti memberikan pengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2008, hal ini sejalan dengan pendapat Todaro (2006) dalam teori siklus populasi-kemiskinan (*population-poverty cycle*), laju

pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis, juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan negara. Disamping itu jumlah penduduk yang terlalu besar akan membatasi anggaran pemerintah untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.

Hal ini akan menyebabkan terjadinya lingkaran setan kemiskinan/*the vicious circle of poverty*, yaitu penduduk miskin dengan pendapatan rendah merasa harus menambah anak untuk meringankan beban kemiskinannya, karena anak dianggap sumber tenaga kerja murah dan sandaran hidup di hari tua, padahal keluarga besar berarti penambahan penduduk yang semakin cepat, penambahan jumlah penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat tabungan, penurunan tingkat tabungan akan menurunkan tingkat investasi masyarakat baik pada pendidikan dan kesehatan, karena dengan keluarga besar dan pendapatan yang rendah akan mempersempit peluang orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan angka fertilitas yang tinggi cenderung merugikan kesehatan ibu dan anak-anaknya, tingkat investasi yang turun akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan akhirnya akan menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin parah. Dengan demikian, argumen ini secara tegas memandang pertumbuhan jumlah penduduk sebagai penyebab sekaligus akibat kemiskinan.

Menurut Todaro (2006), beberapa langkah pengendalian jumlah penduduk antara lain: (1) pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat agar memilih pola keluarga kecil, melalui kegiatan-kegiatan penerangan lewat media massa dan proses pendidikan, baik yang bersifat formal (sistem sekolah) maupun informal (pendidikan di luar sekolah); (2) pemerintah dapat meluncurkan program-program keluarga berencana dengan menyediakan dukungan pelayanan kesehatan dan alat

kontrasepsi secara besar-besaran dalam rangka mendorong timbulnya suatu pola perilaku masyarakat yang diinginkan; (3) pemerintah secara terencana bisa memanipulasi insentif maupun disinsentif ekonomi guna mengurangi jumlah anak per keluarga, misalnya, melalui penghapusan atau pengurangan jangka waktu cuti hamil dan jumlah tunjangan, penghapusan atau pengurangan insentif dalam bentuk uang atau penenaan sanksi keuangan bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak di atas batas maksimum; pengembangan sistem tunjangan hari tua agar orang tua tidak terlalu mengandalkan anak sebagai sandaran hidupnya nanti dan peraturan batas usia minimum bagi tenaga kerja anak untuk bekerja; peningkatan uang sekolah dan penghapusan subsidi pemerintah atas biaya bersekolah di tingkat lanjutan (agar orang tua yang menginginkan anaknya berpendidikan tinggi mau membatasi jumlah anaknya); serta yang terakhir, melalui pemberian bantuan keuangan secara langsung kepada keluarga-keluarga yang anaknya hanya sedikit; (4) pemerintah dapat mencoba memaksa rakyatnya secara langsung agar mereka tidak memiliki banyak anak melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan khusus yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu; (5) menaikkan status sosial dan ekonomi kaum wanita, dengan cara ini akan tercipta kondisi-kondisi positif yang mendorong kaum wanita menjarangkan kehamilan dan menunda perkawinan

4.3.5 Angka melek huruf dan kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi, angka melek huruf memberikan pengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2008. Angka melek huruf disini adalah angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas yang menggambarkan kemampuan membaca dan menulis. Dengan kemampuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memberikan pendapatan yang tinggi.

Menurut Knowles, J (2000), angka melek huruf dapat dicapai dengan menamatkan sekolah dasar selama 4 sampai 5 tahun, oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan angka melek huruf adalah dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam

pendidikan, utamanya masyarakat miskin mengingat 48,17 persen penduduk miskin rata-rata berpendidikan tidak tamat SD, hal ini tercermin pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin yang berpendidikan kurang dari SD mengalami fluktuatif, periode tahun 2005 persentase penduduk miskin yang berpendidikan kurang dari SD sebanyak 50,04 persen, kemudian berkurang menjadi 46,90 persen pada tahun 2006. Pada periode tahun 2007 persentase penduduk miskin yang berpendidikan kurang dari SD mengalami kenaikan sebesar 7,49 persen menjadi 54,39 persen dan turun lagi menjadi 41,34 persen pada tahun 2008.

Tabel 4.7 Persentase Penduduk miskin menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2005-2008

No	Uraian	Ribu Orang				Rata-rata
		2005	2006	2007	2008	
1	Penduduk Miskin	7139,9	7678,1	7155,3	6549,0	7130,6
	< SD	50,04%	46,90%	54,39%	41,34%	48,17%
	Tamat SD/SMP	43,61%	43,61%	39,82%	50,93%	44,49%
	SLTA+	6,35%	6,60%	5,80%	7,73%	6,62%

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan, berbagai tahun

Menurut World Bank (2009), beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan antara lain (1) meningkatkan akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap sekolah dasar dan menengah dan lembaga pelatihan swasta melalui program yang terarah, ini dilakukan mengingat uang sekolah dan biaya lain menciptakan hambatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan; (2) memperbaiki mutu dan efisiensi sekolah dasar; (3) memberikan program beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin atau bantuan langsung tunai untuk meningkatkan angka bersekolah dan mengurangi persyaratan sekolah terkait dengan baju seragam dan biaya tambahan lain; (4) meningkatkan kualitas guru utamanya guru-guru yang ada di pedesaan dan memberikan bantuan buku pelajaran serta bahan mengajar di kelas untuk memperbaiki kualitas pengajaran; (5) melakukan *re-grouping* sejumlah SD yang

memiliki jumlah siswa sedikit dan mengkonversi gedung SD yang lain menjadi gedung SMP, sembari secara selektif membangun gedung SMP baru.

